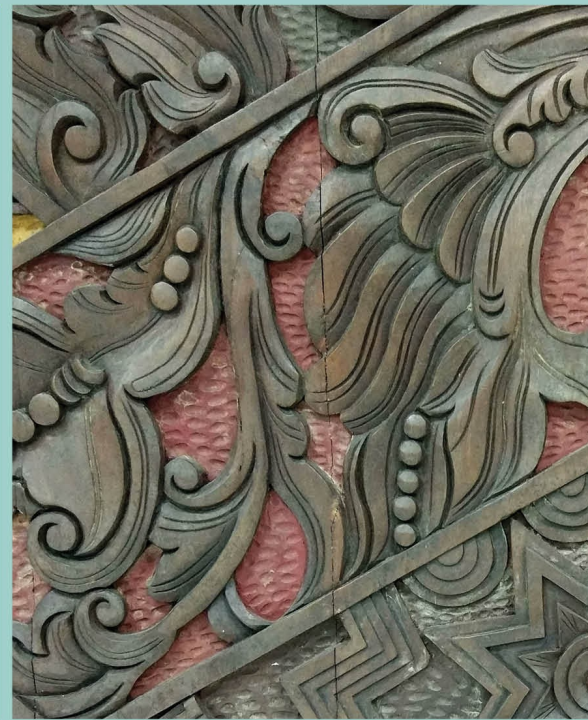


CSIS ELECTION SERIES No. 4




CENTRE FOR
STRATEGIC AND
INTERNATIONAL
STUDIES

Economic Voting
di Indonesia:
**Bagaimana Faktor Ekonomi
Mempengaruhi
Pilihan Politik**



PUSPA D. AMRI & YOSE RIZAL DAMURI



The CSIS Election Series is a means by which members of the Centre for Strategic and International Studies (CSIS) research community can quickly disseminate their research findings and encourage exchanges of ideas. The author(s) welcome comments on the present form of this paper. The views expressed here are those of the author(s) and should not be attributed to CSIS Jakarta.

© 2019 Centre for Strategic and International Studies, Jakarta

Economic Voting di Indonesia: Bagaimana Faktor Ekonomi Mempengaruhi Pilihan Politik

Puspa D. Amri & Yose Rizal Damuri

“Karena indikator perekonomian melemah... kami sebagai partai oposisi yakin punya peluang besar di 2019,”

Ahmad Riza Patria (Metro TV Talk Show, 17 Juli 2018)

“Indonesia dalam empat tahun terakhir ini masuk dalam zona stabilisasi harga yang standarnya itu sudah seperti negara maju. Ini merupakan wujud berhasilnya pemerintahan Jokowi,”

Ahmad Erani Yustika (Kontan.co.id, 21 Oktober 2018)

Ringkasan Eksekutif

1. Meningkatnya diskusi mengenai isu ekonomi menjelang Pilpres 2019 mengindikasikan bahwa situasi perekonomian merupakan salah satu faktor yang menjadi pertimbangan bagi pemilih dalam menentukan pilihan mereka dalam Pilpres 2019.
2. Survei Pilkada 2018 yang dijalankan oleh CSIS memberikan gambaran bahwa pilihan politik terkait erat dengan persepsi mengenai situasi perekonomian. Proporsi pemilih yang akan memilih kembali Presiden Jokowi lebih tinggi dua kali lipat dibandingkan dengan yang akan memilih Prabowo di antara para responden yang mengatakan situasi ekonomi membaik. Sebaliknya proporsi pemilih Prabowo secara signifikan lebih tinggi di antara responden yang mengatakan situasi ekonomi memburuk.
3. Dengan menggunakan model regresi logistik, penulis menemukan bahwa probabilitas untuk memilih petahana naik sebesar 14 poin persen bagi pemilih yang mengatakan ekonomi membaik. Sementara probabilitas turun sebesar 16 poin persen bagi pemilih yang mengatakan ekonomi memburuk. Efek ini lebih tinggi dibandingkan efek dari beberapa faktor lain, termasuk faktor mengenai pandangan keberagamaan.

Economic Voting di Indonesia: Bagaimana Faktor Ekonomi Mempengaruhi Pilihan Politik

Puspa D. Amri & Yose Rizal Damuri

Pendahuluan

Isu-isu terkait ekonomi saat ini makin menjadi salah satu perhatian utama seiring dengan semakin mendekatnya Pemilihan Umum (Pemilu), terutama terkait dengan Pemilihan Presiden (Pilpres). Coba iseng-iseng Anda melihat tren pencarian Google dan masukkan kata-kata seperti “utang pemerintah”, “harga pangan”, ataupun “angka kemiskinan”. Anda akan mendapatkan informasi bahwa pencarian untuk kata-kata kunci tersebut mengalami kenaikan yang tajam, terutama dalam 12 bulan terakhir. Tidak mau ketinggalan, diskusi di media sosial (medsos) juga menunjukkan kecenderungan serupa.

Salah satu dari kutipan di atas menunjukkan keyakinan dari pihak oposisi bahwa isu-isu perekonomian dapat dijadikan amunisi untuk memenangkan Pemilu 2019. Isu-isu pencapaian pemerintahan petahana juga ramai diangkat, seperti kutipan dari staf khusus presiden dalam bidang ekonomi mengenai stabilitas harga. Semakin mendekati Pemilu, berbagai informasi mengenai kondisi ekonomi semakin banyak berseliweran baik di media massa maupun media sosial. Tentu saja tidak semua informasi tersebut berdasarkan data yang valid. Seorang pengamat ekonomi senior yang pernah menjabat menteri terkait ekonomi berkali-kali, bahkan membuat pernyataan tentang tingginya biaya utang pemerintah dengan mengutip data yang menyesatkan, entah disengaja atau salah melihat data. Tetapi ini menunjukkan ketertarikan mengenai isu ekonomi terus meningkat seiring dengan mendekatnya Pemilu.

Pertanyaan yang menarik untuk dijawab adalah apakah observasi dari Riza Patria memang memiliki dasar. Apakah oposisi memang dapat mengambil keuntungan dari berbagai permasalahan ekonomi Indonesia? Sebaliknya, apakah dengan menyebutkan keberhasilan pemerintah dalam menjaga kinerja ekonomi, seperti yang disebutkan oleh Ahmad Erani Yustika, akan meningkatkan kemungkinan petahana untuk terpilih kembali? Jawabannya tergantung dari dua hal: (i) Apakah masyarakat Indonesia memandang bahwa kondisi perekonomian di bawah administrasi Presiden Jokowi memang mengalami pelemahan atau penguatan? (ii) Apakah masyarakat memang menjadikan pandangan mereka terhadap perekonomian sebagai salah satu faktor dalam memberikan pilihan. Atau dengan kata lain: Apakah masyarakat Indonesia akan memberikan imbalan politik (*reward*) ataupun menghukum (*punishment*) petahana berdasarkan situasi ekonomi yang dirasakan?

Apakah oposisi memang dapat mengambil keuntungan dari berbagai permasalahan ekonomi Indonesia? Sebaliknya, apakah dengan menyebutkan keberhasilan pemerintah dalam menjaga kinerja ekonomi akan meningkatkan kemungkinan petahana untuk terpilih kembali?

Tulisan ini mencoba membahas fenomena tersebut. Dengan menggunakan data yang berasal dari Survei CSIS terkait Pemilihan Kepala Daerah 2018 (selanjutnya kita sebut saja Survei Pilkada 2018), kami akan mencoba melihat sejauh manakah faktor ekonomi menjadi salah satu pertimbangan penting dalam pertimbangan pemilih.

Survei tersebut dilakukan pada bulan April 2018 di lima provinsi besar yang melakukan Pilkada di tahun 2018: Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan. Meskipun survei tersebut tidak merepresentasikan keseluruhan pemilih nasional, tetapi kelima daerah tersebut berkontribusi atas lebih dari 70% pemilih nasional. Jumlah sampling yang diambil dalam survei tersebut adalah sekitar 4000 responden dengan metode pengambilan *multi-stage random sampling*.

Literatur “*Economic Voting*”

Literatur mengenai *economic voting* didasarkan landasan bahwa di dalam proses demokrasi, administrasi pemerintahan memiliki insentif untuk memperlihatkan kinerja perekonomian yang baik. Kinerja ekonomi akan dirasakan oleh para pemilih dan akan menjadi salah satu faktor penentu dalam pilihan politik mereka. Pemilih akan memberikan balas jasa, dalam bentuk memilih kembali pemerintahan tersebut, jika perekonomian dirasakan membaik. Sebaliknya, pemilih akan menghukum pemerintahan petahana tersebut dengan tidak memilih kembali, bila kondisi perekonomian dirasakan memburuk atau stagnan.

Menurut Francois Gelineau (2013), ada beberapa asumsi yang melandasi hipotesis *economic voting* ini. Pertama, pemilih harus memiliki kemampuan untuk mengamati kondisi ekonomi nasional maupun kondisi ekonomi keluarga sendiri. Kedua, pemilih menggunakan pengamatan tersebut untuk mengevaluasi kondisi ekonomi nasional (contohnya: harga-harga bahan pokok apakah: semakin baik (stabil), semakin buruk (meningkat pesat), ataukah tidak ada perubahan dibanding tahun sebelumnya?). Ketiga, pemilih harus bisa membuat penilaian logis, sejauh mana pemerintah petahana bertanggung jawab atas kondisi ekonomi negara ataupun keluarga. Seandainya kondisi ekonomi membaik, asumsinya adalah penduduk yang menggunakan hak pilih mampu membedakan apakah perbaikan tersebut hasil dari kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan pemerintah petahana, ataukah akibat dari nasib baik, seperti contohnya terkena imbas positif kondisi ekonomi global.

Ketiga asumsi tersebut lebih tinggi validitasnya di negara-negara maju yang juga sudah lama memiliki sistem pemerintahan yang demokratis. Tidak heran, fenomena *economic voting* di Amerika Serikat, Kanada, dan negara-negara Eropa Barat sudah

Ada argumen yang mengatakan justru karena absennya akar partai politik yang kuat, faktor ekonomi bisa mendominasi pola pikir pemilih dalam menentukan pilihan.

banyak dikaji dengan temuan yang cukup konsisten, yaitu evaluasi masyarakat terhadap kondisi ekonomi selalu memiliki efek positif dan signifikan (secara statistik) terhadap terpilihnya kembali pemerintah atau lembaga legislatif petahana (Lewis-Beck dan Stegmaier, 2013). Namun, di negara berkembang yang kebanyakan masih dalam proses demokratisasi, temuan riset tentang fenomena *economic voting* tidak sekuat di negara-negara maju. Salah satu kendalanya adalah rendahnya akses terhadap dan kemampuan mencerna informasi yang berkaitan dengan isu-isu ekonomi dan kebijakan publik. Kendala lainnya adalah rendahnya kedekatan

masyarakat dengan partai politik. Sebaliknya, ada argumen yang mengatakan justru karena absennya akar partai politik yang kuat, faktor ekonomi bisa mendominasi pola pikir pemilih dalam menentukan pilihan (Tucker, 2006). Seberapa validkah hipotesis *economic voting* ini di Indonesia? Seberapa jauhkah masyarakat di Indonesia menggunakan kacamata ekonomi ketika menentukan pilihan politik?

Bagaimana Pemilih Indonesia Memandang Situasi Ekonomi?

Sebelum menjawab pertanyaan di atas, kami menganalisis bagaimana pemilih Indonesia memandang kondisi perekonomian di bawah administrasi presiden petahana Jokowi berdasarkan sampel survei. Ketika responden diminta mengevaluasi kondisi ekonomi keluarga dalam satu tahun terakhir, 54% responden menjawab keadaan ekonomi keluarga meningkat dan hanya 46% yang menyatakan kondisi ekonomi keluarga tidak meningkat (Tabel 1). Singkatnya, meskipun mayoritas responden menyatakan ada peningkatan kondisi ekonomi keluarga dalam satu tahun terakhir, tidak sedikit yang menyatakan sebaliknya, sehingga terdapat variasi yang cukup besar.

Tabel 1.
Korelasi Persepsi terhadap Kondisi Ekonomi Keluarga dan Pilihan Politik

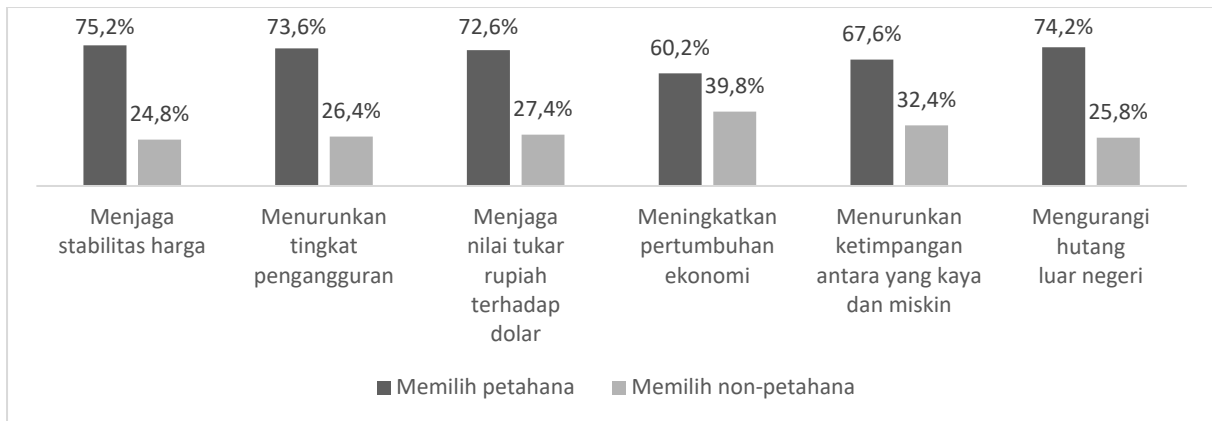
	Kondisi ekonomi keluarga membaik	Kondisi ekonomi keluarga melemah
Proporsi pemilih Jokowi	64,41%	44,16%
Proporsi pemilih Prabowo	35,59%	55,84%

Jika persepsi tersebut dikorelasikan dengan pilihan terhadap Presiden, maka terdapat kecenderungan bagi responden yang mengatakan kondisi ekonomi membaik untuk memilih kembali Presiden Jokowi, dengan proporsi sekitar dua kali lipat. Pemilih yang mengatakan kondisi ekonomi melemah juga cenderung untuk memilih Prabowo, dengan margin yang cukup signifikan. Tabel 1 memberikan proporsi responden berdasarkan persepsi kondisi ekonomi dan pilihan politik mereka.

Selain pandangan kondisi ekonomi umum, responden survei juga diminta menilai tingkat keberhasilan pemerintah petahana dalam menangani isu-isu ekonomi berikut: menjaga stabilitas harga, menurunkan tingkat pengangguran, menjaga nilai tukar rupiah terhadap dolar, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menurunkan ketimpangan antara yang kaya dan miskin, dan mengurangi utang luar negeri. Bagaimana preferensi politik Pilpres di antara sampel yang menilai bahwa pemerintah petahana “berhasil” dan “sangat berhasil” dalam menangani isu-isu ekonomi tersebut?

Ketika responden diminta mengevaluasi kondisi ekonomi keluarga dalam satu tahun terakhir, 54% responden menjawab keadaan ekonomi keluarga meningkat dan hanya 46% yang menyatakan kondisi ekonomi keluarga tidak meningkat.

Figur 1.
Persepsi terhadap keberhasilan pemerintah dalam berbagai isu ekonomi



Berdasarkan analisis Figur 1 di atas, ada korelasi positif antara persepsi terhadap keberhasilan pemerintah petahana dalam berbagai bidang ekonomi dan kecenderungan memilih presiden petahana. Contohnya, dari responden yang menilai pemerintah petahana berhasil menjaga stabilitas harga, 75,2% juga menjawab akan memilih presiden petahana pada saat Pilpres 2019 yang akan datang. Namun korelasi-korelasi tersebut juga beragam. Misalnya, untuk bidang pertumbuhan ekonomi, sebesar 60,2% dari responden yang menilai pemerintah berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi menyatakan akan memilih kembali presiden petahana, lebih kecil jika dibandingkan dengan “menjaga kestabilan harga.” Sepertinya menjaga stabilitas harga lebih penting dibandingkan pertumbuhan ekonomi, untuk menjadi pertimbangan dalam memilih calon presiden, berdasarkan data survei CSIS ini. Menarik juga untuk dicermati bahwa angka serupa untuk “penurunan utang luar negeri” sebesar 74,2%, hampir sama dengan “stabilitas harga”, meskipun isu utang luar negeri baru mulai terasa agak hangat perdebatannya dalam 1-2 tahun terakhir ini.

Apakah Faktor Ekonomi Menjadi Penentu Utama?

Analisis di atas menunjukkan korelasi positif antara penilaian tentang kondisi ekonomi dan kecenderungan memilih presiden petahana. Tetapi analisis tersebut belum lengkap karena belum mengikutsertakan faktor-faktor non-ekonomi yang juga berpengaruh penting dalam memilih calon presiden. Untuk menjawab apakah memang faktor ekonomi menjadi penentu utama, kami menganalisis data Survei Pilkada 2018 dengan metodologi regresi multivariat dan model estimasi logit. Tepatnya, kami menghitung seberapa besar perubahan kecenderungan (probabilitas) memilih presiden petahana pada Pilpres 2019, bila ada perubahan persepsi ekonomi.

Karena pilihan politik ditentukan oleh banyak faktor, di dalam persamaan regresi kami ikutkan juga variabel-variabel non-ekonomi seperti pilihan partai politik pada pemilu legislatif, kedekatan dengan partai politik, serta faktor-faktor sosio-demografis seperti tingkat pendidikan, usia dan tingkat pendapatan. Metode ini sudah banyak digunakan dalam literatur *economic voting*, seperti yang dirangkum oleh Duch dan Stevenson (2005). Dengan sedikit penyesuaian untuk konteks politik elektoral di Indonesia, model regresi yang kami estimasi terangkum di bawah ini:

$$\text{Probabilitas memilih presiden petahana} = \text{faktor ekonomi} + \text{pilihan dan kedekatan parpol} + \text{persepsi keberagaman} + \text{faktor sosio-demografis}$$

Dalam Tabel 2 di bawah ini, kami paparkan rangkuman analisis regresi. Faktor ekonomi adalah apakah kondisi ekonomi nasional dan keluarga membaik, tidak berubah, atau memburuk dalam satu tahun terakhir. Variabel “pilihan parpol” mengukur apakah responden akan memilih partai politik yang pengusung presiden petahana di Pemilu Legislatif 2019 yang akan datang. Terkait itu, kami ikutsertakan variabel yang mengukur tingkat kedekatan responden dengan partai pilihan mereka. Untuk mengukur persepsi keberagaman, kami gunakan skala 1-3 yang mengukur sikap pemilih mengenai tingkat penerimaan terhadap pemimpin yang non-Muslim. Semua variabel di bawah ini memenuhi efek statistik dengan signifikansi 1%.

Tabel 2.
Estimasi perubahan probabilitas rata-rata untuk presiden petahana

<i>Variabel Independen</i>	Perbedaan Probabilitas
Kondisi ekonomi nasional meningkat	0,14
Kondisi ekonomi nasional memburuk	-0,16
Memilih partai politik presiden petahana	0,34
Merasa dekat atau sangat dekat dengan partai politik pilihan	0,06
Persepsi keberagaman	-0,05

Hasil dari analisis di Tabel 2 bisa dirangkum seperti ini. Pertama, variabel yang memiliki efek paling besar terhadap probabilitas memilih capres petahana adalah partai politik yang akan dipilih pada Pileg 2019. Rata-rata, seseorang yang memilih partai politik yang sama dengan partai presiden Jokowi (yaitu PDI Perjuangan) 34% poin lebih tinggi kemungkinannya memilih presiden Jokowi, dibandingkan dengan seseorang yang memilih partai selain PDI-P. Akan tetapi angka ini harus kita cermati, karena bisa juga arah kausalitasnya adalah yang sebaliknya: justru seseorang memilih presiden Jokowi, maka dia juga akan memilih PDI-P pada Pileg. Faktor kedekatan dengan partai politik juga turut berkontribusi positif terhadap probabilitas memilih petahana, tapi estimasi efeknya jauh lebih kecil (+6% poin).

Kedua, meskipun tidak sekuat faktor partai politik, faktor ekonomi kelihatannya memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap probabilitas memilih presiden petahana. Dibandingkan dengan orang yang menilai kondisi ekonomi nasional tidak berubah atau biasa saja, seseorang yang menilai ekonomi nasional itu membaik akan 14% poin lebih tinggi kemungkinan untuk memilih petahana. Ini mencerminkan bahwa kondisi ekonomi akan cenderung membuat seseorang memilih kembali presiden petahana. Boleh dikatakan persepsi positif tersebut merupakan cerminan kepuasan responden akan kinerja pemerintah di bidang ekonomi.

Bisa dikatakan bahwa petahana mendapatkan “hukuman” yang lebih berat dibandingkan dengan “imbalan” yang diterima atas kinerjanya.

Sebaliknya, yang merasa ekonomi nasional dalam satu tahun ini mengalami penurunan, akan lebih rendah 16% poin kemungkinan memilih presiden petahana. Di sini terlihat bahwa persepsi terhadap perekonomian tidak memiliki efek yang simetris terhadap pilihan politik. Seorang pemilih yang menganggap bahwa kondisi ekonomi memburuk akan lebih cenderung tidak memilih petahana dibandingkan dengan pemilih yang mengatakan kondisi ekonomi membaik. Bisa dikatakan bahwa

petahana mendapatkan “hukuman” yang lebih berat dibandingkan dengan “imbalan” yang diterima atas kinerjanya.

Menarik juga untuk dicatat bahwa persepsi keberagaman memiliki kontribusi dalam probabilitas memilih petahana. Tanda negatif menunjukkan bahwa semakin tidak bisa menerima pemimpin yang non-muslim, semakin turun kecenderungan memilih presiden petahana. Namun efeknya cukup kecil, yaitu hanya 5% poin lebih rendah. Hasil ini menunjukkan bahwa kemungkinan faktor-faktor seperti identitas politik juga mempengaruhi pilihan politik. Tetapi jika dibandingkan dengan faktor ekonomi, efeknya lebih kecil. Sementara itu, ada beberapa faktor lain yang tidak kami tampilkan karena secara statistik tidak signifikan menentukan pilihan dalam Pilpres, termasuk persepsi pemilih terhadap situasi penanggulangan korupsi saat ini.

Hasil ini menunjukkan bahwa kemungkinan faktor-faktor seperti identitas politik juga mempengaruhi pilihan politik. Tetapi jika dibandingkan dengan faktor ekonomi, efeknya lebih kecil.

Pentingnya Informasi dan Pengetahuan Ekonomi

Tulisan ini berangkat dari pertanyaan apakah oposisi dan petahana bisa mengambil keuntungan politik dari persepsi mengenai ekonomi Indonesia. Analisis statistik dengan menggunakan data Survei Pilkada 2018 yang kami lakukan menunjukkan bahwa memang persepsi tentang ekonomi nasional adalah salah satu faktor yang signifikan dalam memberikan pilihan di Pemilu 2019 yang akan datang. Petahana cenderung akan dihukum oleh pemilih yang melihat bahwa situasi ekonomi memburuk. Sebaliknya petahana akan mendapatkan dukungan politik dari pemilih yang menganggap situasi ekonomi membaik. Secara statistik kami juga memperlihatkan bahwa efek dari persepsi ekonomi ini bahkan lebih tinggi dari beberapa faktor lain, seperti faktor pandangan mengenai agama di dalam pilihan politik, ataupun kedekatan terhadap partai politik yang mencerminkan kedekatan ideologi pemilih.

Secara lebih jauh, temuan ini dapat memberikan masukan kepada pasangan calon Presiden saat ini dan dimasa mendatang agar perdebatan dan diskusi yang diusung menjadi lebih substantif dibandingkan hanya berkisar pada aspek-aspek politik identitas. Oleh karena itu di diskusi mengenai visi-misi dan program kerja dari kedua pasangan calon juga menjadi hal yang penting karena akan dijadikan rujukan bagi pemilih, bukan hanya pada saat pemilihan tetapi juga dalam menilai kinerja di masa pemerintahan. Oleh karena itu visi-misi dan program kerja haruslah lebih realistis dan dapat dijalankan dibandingkan dengan hanya memberikan slogan-slogan dan retorika belaka.

Di samping itu, informasi yang akurat mengenai situasi perekonomian saat ini perlu untuk tersedia. Studi kami didasarkan atas persepsi mengenai situasi ekonomi. Persepsi tersebut dibentuk berdasarkan pengalaman pribadi (yang tertangkap dalam pertanyaan mengenai ekonomi rumah tangga) dan informasi mengenai situasi ekonomi. Seperti disebutkan di dalam bagian studi literatur di atas, kemampuan untuk memilah apakah situasi yang dirasakan adalah akibat dari kebijakan atau faktor lainnya menjadi penentu mengenai persepsi tersebut dibentuk. Informasi yang lebih baik akan memberikan persepsi yang lebih jernih yang pada akhirnya dapat memberikan pilihan politik yang lebih rasional.

Tentang Penulis

Puspa D. Amri adalah *Assistant Professor* di Sonoma State University, Rohnert Park, California, Amerika Serikat. Sebelumnya, Puspa adalah peneliti ekonomi di Departemen Ekonomi, CSIS Indonesia.

Yose Rizal Damuri adalah kepala Departemen Ekonomi, CSIS Indonesia.